

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA LALAI I/II
KECAMATAN HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS)**

TESIS

OLEH

BOBY TRISMAN MENDROFA

NPM : 151801023



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA LALAI I/II
KECAMATAN HILISERANGKAI KABUPATEN NIAS)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH

BOBY TRISMAN MENDROFA

NPM : 151801023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias)

N a m a : Bobby Trisman Mendrofa

N P M : 151801023

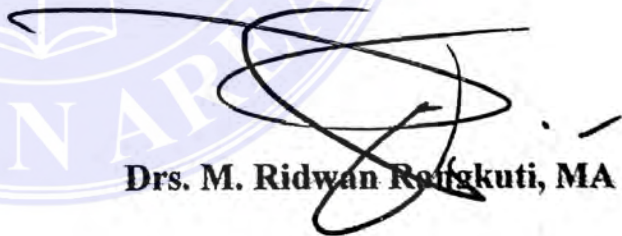
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Pembimbing II



Drs. M. Ridwan Renguti, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 18 September 2018

Nama : Bobby Trisman Mendrofa

NPM : 151801023



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris	: Drs. Kariono, MA
Pembimbing I	: Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II	: Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA
Penguji Tamu	: Dr. Abdul Kadir, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2018

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL 20

794ACAFF324033041

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Bobby Trisman Mendrofa

ABSTRA K

ANALISI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DEA LALAI I/IIKECAMATAN HILISERANGKAIKABUPATEN NIAS)

Nama : Bobby Trisman Mendrofa
NIM : 151801023
Program studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

Hadirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah bagian dari program pemerintah untuk membangun Desa, dengan menyediakan dana dalam jumlah besar. Agar tujuan ini dapat tercapai maka Kepala Desa sebagai pelaksana harus memiliki kualitas dan moral yang baik dalam mengelola Dana Desa. Desa Lalai I/II merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa di tahun 2016. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Lalai I/II ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana Desa di tempat penelitian, termasuk bagaimana dampaknya dihasilkan khususnya dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari Program Dana Desa di Desa Lalai I/II. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dimana proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Sebagai instrumen dalam penelitian Penulis menggunakan berbagai teori para ahli dan penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal internasional yang dapat dijadikan referensi. Implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tempat penelitian masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena peraturan yang terdapat di dalamnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, hal ini diperparah oleh rendahnya kemampuan aparat desa dalam menafsirkan dan mengimplemtasikannya dilapangan. Hasil dari penelitian ini apabila di lihat berdasarkan teori Dunn yang mengatakan bahwa Implemetasi kebijakan publik dapat dikatakan sukses apabila efektif, efisien, dapat memecahkan masalah, dan berkeadilan, maka pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Lalai I/II belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur desa dalam menafsirkan dan mengimplementasikan UU tersebut.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRAC T

ANALYSIS OF THE USE OF VILLAGE FUNDS IN IMPROVING VILLAGE DEVELOPMENT (STUDY IN LALAI I/II VILLAGE, HILISERANGKAI SUB-DISTRICTNIAS DISTRICT)

Name : **Boby Trisman Mendrofa**
NIM : **151801023**
Study program : **Master of Science in Public Administration**
Adviser I : **Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**
Adviser II : **Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA**

The presentation of Law No. 6 of 2014 on Villages is part of the government program to build the Village, by providing large amounts of Funds. so that this goal can be achieved then the Village Head as an implementor must have good ability and morale. The village of Lalai I/II is one of the villages that receive Village Funds. This research was conducted to find out how to manage and use the Village Fund in Lalai I/II Village, and also how the impact is generated for the life of the Society, and to know the various factors that influence the success or failure of the Village Fund program in Lalai I/II Village. The research method used by the writer is a qualitative research method where the process of data collection using interview and observation method. As an instrument in research The author uses various theories of experts and previous research in the form of international journals. The implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages in Desa Lalai I / II did not go as expected. this is because the regulations contained in it only regulate the things that are common, on the other hand the low ability of village officials in interpreting and mengimlemtasikannya. The results of this study if viewed based on Dunn's theory which says that public policy implementation can be said to be successful if it is effective, efficient, able to solve problems, and fair, then the management and use of Village Funds in Desa Lalai I / II is not in accordance with what is explained in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This was caused by a lack of understanding of village regulations in interpreting and implementing the law.

Keywords : **Village Funds, Development Village**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera

Puji dan syukur Peneliti Panjatkan Kebada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya Peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi publik di Universitas Medan Area Medan. Adapun judul dalam peneulisan Tesis ini adalah **“Analisi Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias”**.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Proposal penelitian ini, Terutama kepada Dosen Pembimbing saya Prof.Dr. Marlon Sihombing,MA, dan Drs.M. Ridwan Rangkuti, MA yang telah meluankan waktunya dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam menyusun penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti menyadari Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik dilihat dari dari setiap kalimat maupun isinya. Hal ini karena sebagai manusia biasa Peneliti yang masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian Peneliti berusaha semaksimal mungkin sehinga penulisan proposal ini dapat terselesaikan semaksimal mungkin. oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dari segenap seluruh pembaca, demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, Somoga Tuha Yang Maha Esa memberkati kita semua, Salam sejahtera.

Medan, Desember 2018

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisi Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Warjio, MA.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Marlon Sihombing,MA, dan Drs.M. Ridwan Rangkuti, MA.
5. Ayahanda Sada'aro Mendrofa (alm) dan Ibunda Suniati Gulo, Kakak-kakak saya Tercinta: Herthin Mendrofa, Sherlin Mendrofa, Genius La'ia dan Seluruh keluarga besar dan Kerabat.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2005
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Bapak Kepala Desa Lalai, Edison Mendrofa berserta seluruh aparaturnya.

9. Masyarakat Desa Lalai I/II khususnya yang menjadi Narasumber Penelitian Penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, September 2018
Penulis,

Boby Trisman Mendrofa

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	viii
DAAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN DIAGRAM.....	xiv
DAFRAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Rumusan Masalah	2
1.5 Tujuan Penelitian.....	2
1.6 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Pengertian Implementasi	14
2.3 Teori Kebijakan Publik	16
2.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.6 Teori Evaluasi Kebijakan Publik.....	23
2.7 Permasalahan Desa.....	26
2.8 Pembangunan Desa	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Bentuk Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Kehadiran Peneliti	39
3.4 Sumber Data	40
3.4.1 Data primer.....	41
3.4.2 Data sekunder	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1 Obsevasi	41
3.5.2 Wawancara	41
3.5.3 Dokumentasi.....	41
3.6 Teknik Analisia Data.....	42
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan	43
3.7.1 Kepercayaan	44
3.7.2 Kebergantungan	44

	3.7.3 Kepastian	44
	3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan	45
	3.8.1 Tahapan Sebelum kelapangan	45
	3.8.2 Tahapan Pekerjaan Lapangan.....	46
	3.8.3 Tahapan Analisa Data	46
	3.9 Penelitian	54
BAB	IV : HASIL PENELITIAN.....	46
	4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
	4.2 Idetifikasi Informan	47
	4.3 Dasar Hukum Desa Lalai I/II	47
	4.4 Struktur Organisasi.....	48
	4.5 Tugas Dan Fungsi Aparatur Desa	48
	4.5.1 Tugas Dan Fungsi Kepala Desa	48
	4.5.2 Tugas Dan Fungsi Sekretaris Desa.....	48
	4.5.3 Tugas Dan Fungsi Bendahara Desa.....	49
	4.5.4 Tugas Dan Fungsi KAUR	49
	4.6 Visi dan Misi Desa	50
	4.6.1 Visi	51
	4.6.2 Misi.....	52
	4.7 Gambaran Hasi penelitian	56
	4.8 Evaluasi	58
	4.9 Pembahasan	59
BAB	V : Kesimpulan dan Saran.....	100
	5.1 Kesimpulan.....	101
	5.2 Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	48
Gambar 4.2 Penggunaan Dana Desa	57



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penggunaan dana Desa.....	48
Tabel 4.2 Profil Informan.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Desa desa merupakan ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik dibidang Pemerintahan, pembangunan, sistim kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu samalainya yang meliputi kehidupan dan penghidupan. Akan tetapi, di Indonesia sendiri Desa mengalami kesenjangan yang begitu besar dibandingkan dengan kawasan perkotaan diberbagai aspek, dilihat dari segi pembangunan, ekonomi dan berbagai aspek lainnya yang semakin menegaskan betapa tertinggalnya desa di Indonesia. Oleh karena, sudah saatnya Desa mejadi prioritas utama pemerintah dalam hal melaksanakan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya, dengan memamksimalkan segala sumberdaya yang adadan potensi kearifafan lokal yang telah tersedia, untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antra Desan dan Kota.

Berakhirnya rezim Orde baru mendorong masyarakat untuk mendongkar potensi politik agar lebih desentralistik, dan hal tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya undng undang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999. Undang undang tersebut didampingi dengan undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah. Dua Undang Undang tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masing masing daerah di Indonesia untuk mengembangkan segala

potensinya agar dapat mencapai tujuan bangsa yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur.

Diterbitkannya Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dimana Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya, dengan melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di daerahnya. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah harus di iringi dengan pengawasan yang ketat, untuk menghindari berbagai bentuk penyelewengan kewenangan.

Adanya kesadaran bahwa otonomi tak cukup hanya ditingkat Daerah melainkan dimulai dari tingkat yang lebih rendah turut mendukung diterbitkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menegaskan tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, serta membina dan memberdayakan masyarakat Desa secara Mandiri, sehingga berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan masalah pembangunan, ekonomi, dan sosial dimulai dari tingkat yang lebih rendah.

Dalam pengalokasian dana desa diatur didalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana Desa. Peraturan ini diikuti oleh Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan lain yang juga mengatur tentang petunjuk pengalokasian dan Desa tertuang didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Aturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan ini selain memberi petunjuk bagi Desa dalam menyusun dan mengelolah Anggaran sekaligus sebagai mengawasi penggunaan Dana desa.

Regulasi tentang petunjuk penggunaan dana Desa di Kabupaten Nias telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor No 9 Tahun 2015 Tentang tata cara pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Nias. Pengalokasian dana desa sendiri berasal dari Bantuan Keuangan yang bersumber dari dari APBN yang di transfer ke kas kabupaten/kota, Desa Lalai pada tahun anggaran 2016 menerima dana Desa sebesar Rp.720.442.000 rupiah (Tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah) ditambah pagu alokasi Formula sebesar Rp 84.644.504 (Delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat Rupiah), sehingga total penerimaan dana Desa Lalai I/II Tahun anggaran 2016 adalah 805.065.504 (Delapan ratus lima juta enam puluh lima ribu limaratus empat rupiah. dimana setiap tahapannya Kepala dituntut menyusun Anggaran Belanja Desa (ABD) dan laporan realisasi penggunaan dana Desa setiap ahir tahapannya Kepada Bupati, untuk memastikan penggunaan dana Desa tepat sasaran.

Besaran dana yang dianggarkan untuk dikelola oleh Desa beserta seluruh elemen yang terdapat didalamnya secara mandiri, melahirkan keraguan dari sejumlah pihak, mengingat dalam kurun waktu yang sangat lama Desa sebelum melakukan pembangunan hanya mendapat keuangan bantuan dana terbatas dan pengelolaannya sangat sentralistik oleh satuan instansi Pemerintahan. Disamping itu Desa memiliki banyak keterbatasan, menurut Wasisto dan Tahir (2009:96) keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud adalah:

1. Kualitas sumberdaya Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi Pemerintahan Desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya perencanaan ditingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi Pemerintah Masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas.

Penggunaan Anggaran desa di Desa Lalai I/II berdasarkan pengamatan awal Peneliti, sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan Desa baik

pengaspalan maupun pengerasan jalan, selebihnya digunakan untuk Pembangunan Tembok penahan di beberapa titik yang dikhawatirkan akan terjadi longsor. Mengingat masih banyak sarana prasarana yang perlu untuk dibangun dan perlunya pemberdayaan Masyarakat, maka jelas pemanfaatan dana Desa masih belum optimal. Permasalahan tentang penggunaan Anggaran Desa sempat mengemuka di tengah masyarakat Desa Lalai I/II, yang melibatkan Kepala Desa dan berbagai oknum terkait didalamnya. Hal ini pernah diklarifikasi langsung oleh Kepala Desa Lalai I/II melalui media bahwa hal tersebut hanyalah isu semata yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak senang dengannya. (Admin88,2015, HIPSI meminta INSPEKTORAT dan BPM monitoring secara ekstra pengelolaan dana Desa, diakses tanggal 14 Desember 2016).

Penelitian mengenai yang berkaitan dengan dana Desa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, (Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, 2013, diakses 14 Desember 2016) menyimpulkan bahwa Pengelolaan dana Desa dan Belanja Aparatur desa tidak sesuai dengan aturan, serta belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hal senada juga disampaikan oleh peneliti lain (Hasma Husni, Pertanggung jawaban penggunaan alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggola, 2015, diakses 14 Desember 2016) menyimpulkan bahwa Aturan mengenai pengelolaan dana Desa perlu diperbaiki lagi. Walaupun dilaksanakan ditempat penelitian yang berbeda, kedua hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengelolaan dana Desa belum optimal sebagaimana yang

diharapkan, hal ini disebabkan oleh berbagai hal yang menjadi masalah seperti yang telah Peneliti uraikan diatas.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, Maka Peneliti menyusun Penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA LALAI I/II, KECAMATAN HILISERANGKAI, KABUPATEN NIAS).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berbagai permasalahan yang muncul pada pengelolaan dana Desa, seperti yang telah di ungkapkan dalam latar belakang diatas, maka dapat di Identifikasi sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur Desa yang masih rendah
2. Minimnya teknologi dan fasilitas pendukung Pembangunan Desa
3. Penggunaan dana Desa dalam Pembangunan Masih Belum Optimal
4. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang belum optimal
5. Dugaan Penyelewengan dana Oleh Aparatur Desa
6. Regulasi mengenai pengelolaan dana desa masih lemah.

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, serta jauhnya jarak lokasi penelitian, maka tidak semua masalah dipecahkan melalui Penelitian, oleh karena itu Peneliti akan membatasi dan memfokuskan pada penggunaan dana Desa dalam bidang pembanguana

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa lalai I/II?
2. Apakah kebijakan Pemerintah melalui Dana Desa menjadi solusi yang tepat atas permasalahan pembangunan di Desa Lalai I/II ?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lalai I/II?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa lalai I/II?
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah melalui Dana Desa menjadi solusi yang tepat atas permasalahan pembangunan di Desa Lalai I/II.

4. 3 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lalai I/II?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk Peneliti, selain sebagai syarat tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Medan Area, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan Peneliti, khususnya mengenai pembangunan dan pengelolaan dana Desa.
2. Untuk Lokasi Penelitian, Penelitian ini diharapkan menjadi sumber masukan kepada Desa Lalai I/II untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam hal pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan pembangunan.
3. Untuk Universitas, Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi Peneliti lainnya yang berasal dari Universitas Medan Area.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian. Karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kajian pustaka adalah untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah dilakukan. Hal ini penting karena pembaca akan dapat memahami mengapa masalah atau tema diangkat dalam penelitiannya. Di samping itu, kajian pustaka juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana masalah tersebut dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dengan pengetahuan yang lebih luas.

2.1 Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “*analusis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas, jika di gabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata anlusis ini di serap kedalam bahasa inggris menjadi “analysis”, yang kemudian juga di serap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi “analisis”. Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang

memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Menurut Komaruddin (2001:53) Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap (2004:189) Menurut Harahap bahwa pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Selanjutnya Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ada beberapa pengertian analisis sebagai berikut :

- penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);
- Man penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
- Kim penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya;
- penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; 5 pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

sehingga, ana nalisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam. Pengertian analisis lainnya adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda di setiap tiap bagian / komponen, hubungannya satu sama lain hingga fungsi masing-masingnya.

Dalam ilmu sosial, analisis adalah proses menjelaskan sebuah permasalahan dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Dalam ilmu sains, analisis adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan suatu bahan menjadi senyawa penyusunnya. Dan dalam ilmu kimia, analisa di gunakan untuk menentukan komposisi suatu bahan atau zat. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah, untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang mudah, singkat dan penuh dengan arti.

2.2 Desa

2.2.1 Pengertian

Desa berasal dari bahasa Sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan keseherhanaannya. Ada beberapa istilah desa, misalnya *gampong* (Aceh), *kampung* (Sunda), *nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *huta* (Batak). P.J. Bournen berpendapat bahwa Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut R. H. Unang Soenardjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Selanjutnya menurut Paul H. Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Di Indonesia Pengertian tentang desa diatur didalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1 Permasalahan Desa

Disetiap pedesaan diIndonesia, terdapat berbagai permasalahan dalam proses pembangunana, menurut Wasisto dan tahir (200:96) keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud adalah:

1. Kuaalitas sumberdaya Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnahnya kebijakan pengaturan tentang organisasi Pemerintahan Desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagaipedoman maupun sebagai operasional.

3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya perencanaan ditingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi Pemerintah Masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Desa umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya pembangu di Desa yaitu :

A Masalah Sosial Budaya

1. Rendahnya tingkat pendidikan

Sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus

bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan.

2. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu desa relatif kecil. Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang lebih baik.

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (agribisnis). Aktivitas usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk di daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah/migrasi dari daerah pedesaan menuju daerah lain terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha.

B. Masalah ekonomi

Jika di daerah perkotaan geliat perekonomian begitu fenomenal dan fantastis. Sebaliknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana geliat perekonomian berjalan lambat dan hampir tidak menggairahkan. Roda perekonomian di daerah pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas

produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian (dalam arti luas : perkebunan, perikanan, petanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan produk turunannya). Walaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas.

Aktivitas perekonomian yang ditekuni masyarakat di daerah pedesaan tersebut sangat rentan terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat mencapai harga yang begitu tinggi dan fantastik.

Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang memadai. Banyak diantara mereka memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, yang disebut dengan istilah *petani gurem*. Lebih ironis lagi, sebagian dari penduduk di daerah pedesaan yang malah tidak memiliki lahan pertanian garapan sendiri. Mereka berstatus sebagai petani penyewa, penggarap atau sebagai buruh tani. Petani penyewa adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menyewa lahan pertanian milik orang lain. Petani penggarap adalah para petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau lainnya. Buruh tani adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian garapan milik sendiri melainkan bekerja sebagai buruh yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan memperoleh upah atas pekerjaannya.

C. Masalah Geografis

Di Indonesia mempunyai tingkat kesuburan tanah yang berbeda disetiap wilayah. Tingkat kesuburan tanah juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa, desa yang mempunyai keadaan tanah yang subur cenderung akan mempengaruhi hasil tani yang akan dihasilkan. Semakin baik dan banyak hasil tani yang dihasilkan oleh desa tersebut maka akan sangat mempengaruhi dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Semakin besar pendapatan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi di desa tersebut akan semakin baik.

Letak wilayah desa juga sangat mempengaruhi dari pembangunan desa itu sendiri. Desa yang letak wilayahnya lebih strategis yang dalam hal ini dekat dengan peradaban kota akan berbeda dengan desa yang letaknya sulit dijangkau. Desa yang letaknya sulit dijangkau akan cenderung akan mengalami pembangunan ekonomi yang lambat. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses pemerintah dan dunia luar untuk menjangkaunya. Jadi letak desa yang strategis juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa itu sendiri.

Adapun Solusi dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan desa di antaranya adalah :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan, mengadakan penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat agar tercipta generasi penerus yang memiliki pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah pedesaan akan arus transportasi orang dan barang keluar dan masuk dari dan ke daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Karena salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah pedesaan dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, danau, sungai dan udara), dan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat udara dan sebagainya).
- c. Peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembangunan desa ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan desa dalam aspek fisik.
- d. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan sarana yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa memerlukan waktu yang panjang, banyak pengorbanan, dan bertalian dengan banyak pihak dalam masyarakat termasuk masyarakat di daerah pedesaan. Proses pembangunan desa dimulai dari tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Seyogyanya pada semua tahapan pembangunan desa ini terjadi keterlibatan partisipasi aktif masyarakat daerah pedesaan.

2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang

peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Menurut Kartasmita (2001 : 66) bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

2.5 Teori Implementasi Kebijakan

Secara Etimologi, Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*Implementation*”, yang berasal dari kata kerja “*to implement*” yang dalam bahasa Latin disebut “*implementatum*”, berasal dari kata “*impere*” dan “*pere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi sedangkan “*plere*” berarti “*to full*” yaitu mengisi agar penuh. “*to Implement*” mengandung tiga arti antara lain;

1. Membawa kesesuatu hasil (akibat)
2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu
3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat

Presman dan Aaron mendefinisikan Implementasi bahwa: Kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian suatu pekerjaan dengan memanfaatkan sarana maupu prasarana dalam mencapai hasil yang maksimal (sitorus,2013:83-84). Senada dengan Teori Presman dan Aaron, Edwar III mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan suatu kebijakan seperti keputusan-keputusan yang dibentuk dalam sebuah Undang-Undang yang dilakukan oleh Legislatif (Parlemen), atau peraturan yang dikeluarkan oleh Eksekutif, maupun peraturan yang diloloskan oleh Yudikatif (Peradilan atau Mahkamah), kebijakan publik yang dikeluarkan tersebut dapat memberikan suatu konsekuensi dalam berbagai aspek tatanan kehidupan.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting dalam keseluruhan strutur kebijakan, hal ini diperkuat oleh Teori Chief J.O Ujodi yang mengatakan bahwa Pelaksanaan Kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya menurut Chief, suatu kebijakan hanyalah sekedar rencana bagus atau dokumen yang tak bermakna bahkan menjadi tumpukan kertas didalam lemari apabila tidak di Implementasikan

Dari beberapa teori para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah Proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui, oleh pembuat kebijakan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah ataupun dengan

bekerjasama dengan pihak swasta dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Model merupakan adalah keterkaitan antara Variabel yang satu dengan yang lainnya dan telah mendapat proses penyederhanaan sehingga lebih fleksibel dalam memahami yang fenomena yang sedang terjadi. Dengan demikian dengan menggunakan model Implementasi kebijakan, akan lebih mudah memahami realita pelaksanaan Kebijakan ataupun program. Dikarenakan topik dari penulisan Proposal ini mengenai penggunaan dana Desa dalam Pembangunan Desa Peneliti menggunakan Model Implementasi Marilee S. Grindle.

Implementasi Kebijakan menurut Marilee S. Grindle akan sangat ditentukan oleh Isi kebijakan dan konteks Implementasinya. Pada ide dasarnya pada saat kebijakan publik ditrasformasikan, lalu kemudian Implementasi kebijakan dapat dilakukan. Untuk itu, Keberhasilan Implementasi kebijakan Menurut Marilee S. Grindle sangat ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan yang mencakup :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

☐ Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

☐ Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

☐ Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Mencakup :

a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor

c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

□ Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) Mencakup :

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-
Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan

dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Menurut Prof. Monang, kesuksesan dari implementasi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Isi kebijakan: Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, harus tersedia (isi) kebijakan yang akan di implementasikan yang bersifat umum, dan harus ditopang oleh petunjuk pelaksanaan teknis, yang mempermudah para Implementor mengimplementasikannya.
2. Lembaga Pelaksana: Agar proses pengimplementasian kebijakan publik terlaksana dengan baik, maka harus ada lembaga atau organisasi yang melaksanakannya, yang didalamnya terdapat sistem kewenangan, status, tupoksi, sehingga menjadi sebuah sistem yang utuh.
3. Sikap Implementor : Secara Operasional dapat diartikan derajat atau tingkat kesesuaian dengan objek tertentu, serta mengandung komponen antara lain: a.
 - Kongnisi yang berhubungan dengan kepercayaan, ide, dan konsep.
 - Efektif yang menyangkut dengan kehidupan emosional seseorang
 - Konasi yang merupakan kecenderungan dalam bertindak.
4. Sarana dan Prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/Media dalam mencapai maksud atau tujuan isi kebijakan itu sendiri, sedangkan prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses agar tujuan implementasi dapat terealisasi.

5. Faktor Sosial, Budaya, dan Politik: Jika kondisi Sosial, Budaya, dan Politik tidak kondusif, maka Implementasi kebijakan akan sulit untuk diterapkan.

2.6 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa pengertian Evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, analisis akan dihadapkan pada 3(tiga) aspek:

1. Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analisis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat.
2. Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analisis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-

faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai tujuan. Menurut Bressman dan Wildavsky (Jones, 1991) implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, para ahli kebijakan publik banyak menggunakan model implementasi yang salah satunya adalah model Merilee S Grindle (1980). Model Grindle menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu : 1) tujuan kebijakan, 2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang terdiri atas : kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan, dan context yang terdiri atas : kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana; karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

3. Aspek evaluasi, pada aspek ini analisis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses untuk mempelajari konsekuensi dari suatu kebijakan serta pengumpulan informasi sebagai bahan

pertimbangan bagi kebijakan kebijakan selanjutnya. menurut Samudro, dkk (1994) evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Sedangkan evaluasi menurut Limberry (dalam Santoso, 1992), analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono, 1992) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisasikan suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan kebijakan tersebut.

Agar Evaluasi kebijakan publik sukses diterapkan menurut Dunn (1994:405) sejumlah kriteria yang harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi yaitu:

1. *Effectiveness* yang berupa pemberian informasi tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki.

2. *Efficiency* berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan dalam mencapai hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi.
3. *Adequacy* menunjuk pencapaian hasil dihubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Equity* digunakan untuk mengukur pembagian keadilan diantara kelompok-kelompok atau pihak pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan ruginya.

Studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan (Sudiyono,1992) yaitu

1. Pendekatan kepatuhan, asumsinya apabila para pelaksana mematuhi semua petunjuk atau aturan yang diberikan maka implementasi sudah dinilai berhasil. Kemudian pendekatan ini disempurnakan lagi dengan adanya pengaruh : a) ekstern, kekuatan non birokrasi dalam pencapaian tujuan, b) intern, program yang dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kebijakan sering tidak terdesain dengan baik sehingga perilaku yang baik dari para pelaksana (birokrasi) tetap tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan.
2. Pendekatan perspektif, "*what's happening* (apa yang terjadi). Pendekatan ini menggambarkan pelaksanaan suatu kebijakan dari seluruh aspek karena implementasi kebijakan melibatkan beragam variabel dan faktor.

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
2. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Agar evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan baik, terdapat beberapa langkah penting yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi, antara lain:

1. Perlu ditetapkan alat ukur atau standar kriteria maupun tolak ukur yang telah ditetapkan sejak awal pada tahap perencanaan.
2. Pembuatan petunjuk hasil sebagai pedoman dalam menemukan sejumlah indikator yang dipercaya apabila tidak perlu koreksi dilakukan atau tidaknya.

3. Pemantauan tidak langsung melalui laporan laporan dan jaringan informasi secara langsung di tempat-tempat penyelenggaraan kebijakan.
4. Mengadakan penilaian atau evaluasi dengan membandingkan antara pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan standar yang digunakan sebagai alat ukur kegiatan.
5. Tindakan perbaikan atau koreksi perlu dilakukan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan Metodologi dengan pendekatan kualitatif merupakan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Dalam hal penelitian kualitatif, Creswell didalam Sugyono (2016:16-17) menyatakan bahwa *“qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging question and procedures; collecting data in the participants setting; analyzing the data inductively, building from particulars to general themes: and making interpretations of the meaning of data. The final written report has a flexible writing structure.”* Hal tersebut dapat diartikan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul; Mengumpulkan data dalam setting peserta; Menganalisis data secara induktif, membangun dari khususnya ke tema umum: dan membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis terakhir memiliki struktur penulisan yang fleksibel.

Secara umum terdapat 6 (enam) macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, partisipatories, dan penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, Penelitian ini dilakukan di Desa Lalai I/II yang beralamatkan Jalan Nias Tengah Kilo meter 24 , Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan Penelitian dimulai dari tanggal 10 April 2017 hingga 24 April 2017. .

3.3 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. sedangkan instrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat Bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrument pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti,

sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Lalai I/II. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Lalai I/II. sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Lalai I/II.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Lalai I/II melalui proses dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Menurut Moleong (210:324) kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (kreadibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) kebergantungan (dependibility), (4) kepastian (konfirmability). Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

1. Kepercayaan (kreadibility)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

2. Kebergantungan (dependibility)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh ouditor independent oleh dosen pembimbing.

3. Kepastian (konfirmability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

3.8 Tahapan Penelitian

Moleong mengemukakan bahwa "Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : (1) tahap sebelum ke lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan". Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
- b) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Lalai I/II.
- c) Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara mengenai bagaimana proses pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan di Desa Lalai I/II.. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

d) Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan tesis yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan penulis tesis yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian tesis.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. **Membangun Desa Partisipatif**. Yogyakarta : Ghaha Ilmu. 2066.
- Adisasmita, Rahardjo. **Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan**. Yogyakarta: Graha Ilmu: 2013
- Arsyad, Linkolin, et.al., **Strategi Pembangunan Perdesaan Barbasis Lokal**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2011
- Hagul, Feter. **Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat**. Jakarta: Rajawali. 1992
- Hardjanto, Imam. **Teori Pembangunan**: UB Press. 2011
- Sitorus, Monang. **Teori Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi**. Bandung : Unpad Pres. 2013
- Sumaryadi, I Nyoman. **Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta: Citra Utama. 2005
- Sumodiningrat, Gunawan. **Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial**. Jakarta, : Gramedia Pustaka Umum. 1999
- Osborne, David, and Peter Plastrik. 1996. **Banishing Bureaucracy (The Five Strategies for Reinventing Government)**, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Osborne, David and Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government (How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector)* Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Whittaker, James B., 1995. *The Government Performance and Results Act of 1993 : A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institute,

Yuatisia, Visi, Tim, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan terkait*. Jakarta : Visitmedia. 2014

_____ Admin 88, *HIPSI Meminta INSPEKTORAT dan BPM monitoring secara ekstra pengelolaan dana Desa*, diakses dari <http://www.Media88.com/read/news/> diakses pada tanggal 14 desember 2016 pukul 22:00

<http://theijhss.com/wp-content/uploads/2015/07/26.-HS1507-050.pdf>.

<http://www.ijarsite.com/wp-content/uploads/2016/10/IJAR-14-3-2016.pdf>.

http://www.journalijar.com/uploads/175_IJAR-6618.pdf.

https://www.woarjournals.org/admin/vol_issue1/upload%20Image/IJGAES021503.pdf

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/148/136>.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PERANGKAT DESA DAN TOKOH MASYARAKAT

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probit and Legality*):

☐ Demi kepatuhan terhadap hukum dan agar terhindar dari Berbagai pelanggaran dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa Lalai I/II sudah menjalankan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tahun 2009 dan Peraturan Bupati tahun 2014?

Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) :

☐ Sebagai Institusi Pengelola dan Pelaksana Alokasi Dana Desa, apakah Pemerintah Desa sudah membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tahun 2014 ?

☐ Apakah pemerintah desa sudah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa ?

☐ Dalam melaksanakan ADD apakah Kepala Desa sudah menjalankan tugas menyusun Rekapitulasi dan Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ?

☐ Dalam melaksanakan ADD apakah Ketua Pelaksana Teknis yaitu Sekretaris Desa sudah melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana ?

☐ Dalam melaksanakan ADD apakah Bendahara sudah menyusun laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD?

Apakah Pemerintah Desa sudah menerapkan penggunaan Alokasi Dana Desa Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) dan Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat ?

Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) :

☐ Siapa sajakah yang dilibatkan dalam penyusunan Program Rencana Penggunaan Dana ?

☐ Program apa sajakah yang sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ?

☐ Dalam Belanja Pemberdayaan Masyarakat program apa saja yang sudah dijalankan dan sudah optimalkah program tersebut?

Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*),

☐ Apakah Ketua tim pelaksana sudah menyampaikan informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa?

☐ Bentuk transparansi kebijakan apa yang sudah di sampaikan kepada masyarakat tentang Alokasi Dana Desa ?



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

Partisipasi

☐ Keterlibatan hal apakah yang diikuti masyarakat dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa ?

Transparansi

☐ Apakah pemerintah desa sudah terbuka tentang informasi Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat ?

Cepat tanggap

☐ Dalam pelaksanaan penggunaan dana alokasi dana Desa apakah pemerintah Desa sudah memenuhi kebutuhan publik ?

Keadilan

☐ Apakah program Alokasi Dana Desa sudah memperhatikan kepentingan masyarakat miskin ?

Berorientasi Kepada Masyarakat

☐ Dalam pelaksanaan alokasi dana desa, apakah dalam program tersebut berorientasi kepada kepentingan masyarakat ?

Supremasi Hukum

☐ Agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sudahkah pemerintah desa membangun hukum yang sehat ?

Efektif dan Efisien

☐ Dalam pelaksanaannya apakah Alokasi Dana Desa sudah mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat ?

Bertanggung Jawab

☐ Apakah Pemerintah Desa sudah bertanggung jawab atas pengaplikasian dalam program Alokasi Dana Desa ?

Visi Strategi

☐ Agar terwujudnya atau terciptanya keselarasan dalam pembangunan desa apakah masyarakat mempunyai visi dalam Alokasi Dana Desa untuk merubah kon



Efektif dan Efisien

☐ Dalam pelaksanaannya apakah Alokasi Dana Desa sudah mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat ?

Bertanggung Jawab

☐ Apakah Pemerintah Desa sudah bertanggung jawab atas pengaplikasian dalam program Alokasi Dana Desa ?

Visi Strategi

☐ Agar terwujudnya atau terciptanya keselarasan dalam pembangunan desa apakah masyarakat mempunyai visi dalam Alokasi Dana Desa untuk merubah kon



HASIL WAWANCARA

1. Isi Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

hasil wawancara dengan Kepala Desa lalai I/II, Bapak Edison Mendrofa menyampaikan bahwa:

“Adanya program Dana Desa dari pemerintah pusat merupakan anugerah yang harus disyukuri, oleh karenanya dalam mengimplementasikan program ini di Desa Lalai I/II ini, saya selaku Kepala Desa yang telah diberikan amanah, tidak memiliki kepentingan apapun untuk dalam mengelola Dana Desa, hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 16 Tahun 2015 tentang penetapan Alokasi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Nias, sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang saya kerjakan murni untuk kepentingan masyarakat Desa Lalai I/II.” (Wawan Cara tanggal 12 April 2017. Pukul 19.15)

Ibu Suniati Gulo selaku Anggota BPD Desa Lalai I/II menambahkan:

“Menurut saya, Sejauh ini dalam proses pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lalai I/II, ini Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan BPD disetiap Program yang dilaksanakan, sebab setiap program membutuhkan persetujuan BPD melalui tanda tangan, sejauh ini juga BPD belum menerima keluhan dari Masyarakat mengenai Pengelolaan Dana Desa ini, jadi dapat dikatakan tak ada kepentingan terselubung dalam Pengelolaan Dana Desa ini.” (Wawancara tanggal 15 April tahun 2017. Puku 18.00)

Bapak A'aro'o Mendrofa selaku masyarakat Desa Lalai mengatakan:

“Saya tidak tahu persis apakah ada kepentingan dari Kepala Desa dan aparat terkait dalam pengelolaan dana Desa ini karna jujur saya tidak terlalu mengerti sepenuhnya mengenai Dana Desa, yang saya tahu program pembangunan jalan dari Dusun II menuju Dusun satu telah dilaksanakan” (Hasil Wawancara Tanggal 25 April 2017. Pukul 18.00)

h Bapak Arah Wajib Harefa bahwa:

“Saya tidak tahu persis ada tidaknya kepentingan terselubung Kepala Desa dan Aparat terkait, sebab saya tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses yang berhubungan dengan Dana Desa itu sendiri” (Hasil Wawancara tanggal 19 April 2017. Pukul 09.00)

Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Hasil wawan cara dengan kepala Desa

“Program Dana Desa ini sangat besar manfaatnya Bagi Desa Lalai I/II, sebab dengan diberikanya kepercayaan kepada Desa mengelolah keuangan yang ditunjukan untuk melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat maka program ini akan lebih efektif, sebab hanya Desa Lalai sendiri yang tau persis apa yang dia butuhkan, berkaca dengan yang sudah kita lakukan di Desa Lalai I/II ini Pembangunan memberikan dampak yang sangat besar yakni dengan adanya pengaspalan jalan dari Dusun I hingga Dusun III, maka membantu perekonomian masyarakat sebab masyarakat yang datang dari Dusun III dan Dusun I akan mampu menjual hasil buminya ke Dusun II yang seperti kita ketahui merupakan tempat penjualan hasil bumi karena pasar tradisional berada disitu. Selain itu program ini juga mengarahkan setiap Desa untuk menggunakan setiap Desa memaksimalkan potensinya, seperti yang kita lakukan selama ini dalam pembangunan jalan, tenaga kerja yang kita gunakan sebagian besar masyarakat Desa Lalai sendiri, demikian pula halnya dengan bahan bahan yang digunakan seperti Batu, kerikil ,dan pasir kita beli dari masyarakat Desa Lalai sendiri.”(Wawancara tanggal 12 April 2017.Pukul 19.15)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Yontirius sebagai KAUR Pembangunan Desa Lalai I/II yang mengatakan bahwa :

“ Program ini sangat bermanfaat menurut saya, apa bila program ini tidak dibuat oleh pemerintah Pusat maka mustahil terjadi pembangunan jalan didesa Lalai I/II, disa dilihat dari program-program terdahulu”(Hasil Wawancara tanggal 11 April 2017. Pukul 21.00)

Akan tetapi hal ini sedikit berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Arah Wajib Harefa selaku Masyarakat :

“ menurut saya adanya Pembangunan Jalan merupakan Anugerah yang harus disukuri, tetapi menurut saya dengan dana yang berkisar Rp 535.903.000 khusus pengaspalan jalan yang berukuran 3Meter x 480 Meter, sedikit berlebihan kemudian masyarakat yang dilibatkan dalam proses pembangunan, hanyalah orang-orang tertentu saja, Demikian dengan Pemberdayaan Masyarakat yang menghabiskan biaya Rp 35.000.000 untuk pembinaan kelompok tani yang sampai saat ini tidak ada manfaatnya, sebab anda tau sendiri masyarakat kita umumnya petani karet, apa bila musim hujan maka tidak bisa bekerja, seharusnya disinilah Pemerintah Desa terlibat dengan memberikan pelatihan pada masyarakat agar memiliki pekerjaan alternatif, misalnya Kerajinan tangan yang bahan bakunya tersedia dikebun-kebun warga, apalagi pemerintah pusat sedang mengkampanyekan ekonpmi kreatif”(Wawancara tanggal 19 April 2017.Pukul 19.00)

Pernyataan berbeda dengan masyarakat lainnya, Bapak Yafao Mendrofa yang mengatakan bahwa :

“Program Dana Desa ini bermanfaat, sebab saya dilibatkan bekerja selama tiga hari dalam proses pembangunan jalan, dan ahah itu sangat membantu perekonomian saya, seperti anda ketahui sendiri dimusim hujan seperti ini petani karet seperti saya tidak dapat bekerja dan mendapat uang.” (Wawancara tanggal 13 April 2017 Pukul 08.30)

Derajat perubahan yang diinginkan

. Menurut Bapak Edison Mendrofa selaku Kepala Desa Lalai I/II :

“ Menurut saya program ini sangat memberikan manfaat sangat besar bagi Desa Lalai, seperti anda lihat sendiri pembangunan jalan yang melintasi Dusun I sampai Dusun III sangat menunjang aktifitas warga, dimana Dusun I dan Dusun III yang letaknya jauh dari jalan Provinsi dapat dijangkau oleh kendaraan beroda empat dan roda dua. Kemudian pada program Pemberdayaan Masyarakat kita memberdayakan warga untuk menanam jagung, cabai, dan berbagai jenis sayuran, serta mengajarkan warga untuk membuat pembesmi hama nabati yang bahan bakunya terdapat dikebun milik warga” (Wawancara tanggal 12 April 2017. Pukul 19.15)

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Bapak Otahogo Mendrofa selaku Tokoh Masyarakat yang mengatakan :

“Program ini menelan biaya yang sangat besar ya, namun khususnya dalam program pemberdayaan yang seperti mati suri, perkebunan percontohan disetiap Dusun juga terbengkalai, dan masyarakat yang terlibat didalamnya juga terbatas” (Wawancara tanggal 17 April 2017. Pukul 20.00)

Sedangkan Bapak Efori Mendrofa selaku tokoh Masyarakat yang juga memberi tanggapan lain bahwa:

“Program ini sebenarnya memberi dampak yang sangat baik bagi masyarakat, apabila dilaksanakan dengan baik dan melibatkan semua elemen masyarakat, takbisa dipungkiri bahwa adanya perpecahan di desa Lalai yang disebabkan oleh berbagai hal membuat turut mempengaruhi program ini” (Wawancara tanggal 15 April 2017. Pukul 20.00)

a. Letak Pengambil Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Menurut Kepala Desa Lalai I/II, Bapak Edison Mendrofa :

“ Seluruh Keputusan yang berkaitan dengan Dana Desa ini mulai dari perencanaan, penentuan program, hingga pada pelaksanaan semuanya melalui Musyawarah dan diketahui oleh BPD, serta pihak Kecamatan yang mengutus perwakilannya ketika Musyawarah Berlangsung” (Wawancara Tanggal 12 April 2017.pukul 19.15)

Hal yang sama juga di katakan oleh ibu Suniati Gulo, selaku Anggota DPM Desa Lalai I/II yang mengatakan bahwa :

“Sejauh yang saya ketahui bahwa setiap kegiatan di Desa lalai termasuk program Dana Desa ini, keputusan yang di ambil selalu melalui Musyawara dan Mufakat, dan Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan kami BPM” (Wawancara tanggal 15 April tahun 2017. Puku 18.00)

Hal ini juga didukung oleh Sekertaris Camat Kecamatan Hiliserangkai yang mengatakan bahwa:

“ Sejauh ini keputusan yang diambil disetiap kegiatan di Desa Lalai I/II keputusan yang diambil selalu melalui musyawarah, hal ini selalu dipantau oleh pihak Kecamatan, sebab setiap pelaksanaan Rapat selalu dihadiri oleh Pak Camat atau perwakilan apabila Beliau berhalangan”(Wawancara tanggal 18 April 2017. Pukul 13.45)

Menurut Pak Yosafati selaku Masyarakat :

“Keputusan yang diambil disetiap kegiatan memang melalui Musyawarah dan mufakat karna menghadiri rapat yang dilakukan oleh Desa”(Wawancara tanggal 16 April 2017. Pukul 19.00)

Akan tetapi Pak Beni wa'o selaku Masyarakat memiliki pendapat yang berbeda dan mengatakan bahwa:

“ Menurut saya musyawarah dan mufakat yang dilakukan untuk mengambil keputusan hanya formalitas semata, terdapat hal-hal yang diluar keputusan rapat yang diambil oleh Kepala Desa, misalnya saja ketika ada sisa aspal yang tidak habis digunakan ketika pembangunan, dijual oleh kepala Desa tetapi uangnya dibagi-bagi bersama dengan orang-orang tertentu, dan masih banyak lagi tapi malas saya sebutkan” (Wawancara, tanggal 13 April 2013. Pukul 22.00)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Pak Yustinus Mendrofa yang berpendapat bahwa:

“Saya tidak tahu persis bagaimana keputusan yang menyangkut Dana Desa, sebab saya tidak terlibat didalamnya, sebab yang menghadiri rapat hanyalah orang-orang yang pro dengan Kepala Desa saja” (Wawancara, tanggal 18 April 2013. Pukul 18.30)

Pelaksana Program

Menurut Bapak Edison Mendrofa selaku Kepala Desa Lalai I/II bahwa:

“ Dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Lalai 1/II tidak hanya dikerjakan oleh Saya sebagai Kepala Desa, namun terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, dimana Anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (Wawancara Tanggal 12 April 2017.pukul 19.15)

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ibu Suniati Gulo selaku BPD Desa Lalai yang mengatakan bahwa:

“sejauh pengamatan saya sebagai anggota BPD, dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa Kepala Desa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan persetujuan DPD. dimana kriterianya memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, mampu mengambil keputusan, tidak pernah terlibat KKN, menandatangani pakta Integritas, tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa, serta memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya.” (Wawancara tanggal 15 April tahun 2017. Pukul 18.00)

Menurut Bapak Arofao Mendrofa selaku Masyarakat berpendapat bahwa :

“ Sepengetahuan saya pelaksanaan kegiatan Desa selama ini dilaksanakan melalui TPK yang orang-orangnya hanya yang pro dengan Kepala Desa saja”(Wawancara Tanggal 28 April 2017. Pukul 21.00)

Pak Angandrowa Mendrofa selaku masyarakat Masyarakat mengatakan:

“Soal pelaksanaan kegiatan, saya tidak tahu persis seperti apa, karna dari awal saya tidak terlibat” (Wawancara tanggal 20 April. Pukul 18.50)

Sumber Daya yang dikerahkan

Menurut Bapak Edison Mendrofa Sebagai Kepala Desa Lalai I/II mengatakan bahwa :

“Harus saya akui memang didesa Lalai I/II ini kita kekurangan SDM yang kompeten , karna biasanya yang berpendidikan tinggi umumnya telah bekerja di tempat lain, atau merantau keluar daerah, ditambah lagi di dalam masyarakat kita terdapat sedikit gesekan atau permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Akan tetapi sebias mungkin dalam melaksanakan kegiatan Desa, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan Dana Desa itu sendiri, sebias mungkin menggunakan segala Potensi yang kita miliki seperti yang saya katakan sebelumnya pekerja yang kita rekrut dalam proses pembangunan sebagian besar Masyarakat Desa Lalai I/II, demikian pula bahan-bahan bangunan sebias mungkin kita gunakan yang telah tersedia di Desa Lalai sendiri, apabila terdapat hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan maka kita menyewa jasa, orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya.” (Wawancara Tanggal 12 April 2017. pukul 19.15)

Hal ini didukung oleh Bapak Agusman Mendrofa selaku Bendahara Desa.

“Menurut saya kita memang kekurangan orang-orang yang mampu memanfaatkan teknologi seperti komputer dan juga orang-orang yang memberikan ide-ide yang baik untuk kemajuan Desa Lalai ini sendiri. Sekalipun ada manusia yang kompeten tetapi tidak mau terlibat.”(Wawancara tanggal 19 April 2017.20.30)

Menurut Bapak Eliusu Mendrofa selaku tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Kita memang tidak memiliki Sumber Daya Manusia seperti di Perkotaan, tetapi saya lihat banyak generasi muda kita yang berpendidikan minimal SMA atau sederajat, apabila diberikan kepercayaan dan diberi pelatihan maka akan menjadi aset penting untuk Desa kita”(Wawancara tanggal 23 April 2017. Pukul 18.30)

4. Konteks Implementasi

- a. Kekuasaan Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.** Menurut Bapak Edison Mendrofa selaku Kepala Desa Lalai I/II :

“ Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya selaku Kepala Desa diberi amanah untuk mengelolah Dana Desa Lalai I/II secara mandiri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Bapak Bupati, dengan berkoordinasi dengan BPD, membentuk TPK dan seluruh elemen masyarakat, dan strategi kita adalah dengan melibatkan seluruhnya untuk bersatu padu untuk kebaikan Desa Lalai I/II, dan semuanya saya telah membuat laporan pertanggung jawabannya baik kepada Masyarakat, Camat, Maupun Bupati, serta beberap kali di periksa oleh Inspektorat. Jadi dapat saya pastikan bahwa semua yang saya kerjakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Lalai I/II” (Wawancara tanggal 12 April 2017. Pukul 19.15)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nefita Mendrofa sebagai Pegawai kecamatan Hiliserangkai.

“ Sejauh pengamatan kita pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lalai terlaksana dengan baik, Karna kita dari tingkat kecamatan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan yang dianggap perlu, namun berdasarkan setiap laporan pertanggung jawabannya dapat dilihat bahwa Kepala Desa telah mengakomodir setiap kebutuhan Warganya, sekalipun terdapat sedikit permasalahan dari sebagian masyarakat.” (Wawancara tanggal 21 April 2017.Pukul 20.15)

Menurut Arofati Mendrofa selaku masyarakat Desa Lalai:

“ Saya tidak mengerti betul bagaimana kekuasaan, kepentingan dan strategi dan aktor yang terlibat, sebab yang terlibat selama ini hanyalah orang-orang yang dekat dengan Kepala Desa saja” (Wawancara tanggal 19 April 2017.Pukul 20.15)

Demikian pula dengan yang disampaikan bapak Afolo Mendrofa

“Saya tidak paham mengenai itu, yang saya tau sejak Dana Desa bergulir Kepala Desa dapat membeli Mobil Truk pribadi, walaupun saya tidak tau apakah itu yang diselewengkan dari Dana Desa atau Bukan” (Wawancara tanggal 16 April 2017. Pukul 20.15)

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Menurut Bapak Edison Mendrofa Selaku Kepala Desa :

“ Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Desa Lalai I/II ini saya selalu berkoordinasi dengan BPD dan tingkat kecamatan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, oleh karenanya setiap kegiatan yang dilakukan di Desa termasuk yang berkaitan dengan Dana Desa ini sendiri, selalu melalui musyawarah dan mufakat, sehingga dapat mengakomodir segala sesuatu yang menjadi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat, sekalipun ada satu atau dua orang yang tidak senang dengan saya selaku Kepala Desa, namun sebisa mungkin kita laksanakan, bahkan saya selalu mengupayakan rekonsiliasi dengan berbagai cara termasuk cara kekeluargaan untuk mengatasi keretakan-keretakan kecil ditengah Masyarakat, demi kemajuan Desa Lalai I/II ini sendiri” (Wawancara tanggal 12 April 2017. Pukul 19.15)

Menurut Ibu Suniati Gulo selaku anggota BPD Desa Lalai I/II :

“ Sejauh ini Pemerintahan Desa Lalai I/II ini cukup demokratis karena kami sebagai BPD selalu mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa dimulai dari perencanaan, pembuatan UUDes, Pelaksanaan Kegiatan, serta melakukan evaluasi atas seluruh kinerja Pemerintah Desa dan apratnya, bahkan menjembatani berbagai hal termasuk persoalan yang menyangkut antara masyarakat dengan Kepala Desa.” (Wawancara tanggal 15 April tahun 2017. Puku 18.00)

Sedangkan Bapak Fo’arota Mendrofa selaku Masyarakat mengatakan bahwa:

“ Menurut saya bahwa karakter dari Pemerintah sekarang yah belum mampu mengakomodir seluruh elemen masyarakat, terbukti dengan adanya keretakan didalam masyarakat kita, bayangkan saja yang terlibat dari rapat, pelaksanaan, hingga pesta syukuran Desa hanya melibatkan sebagian orang”(Wawancara 22 April 2017. Pukul 08.00)

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Yamonaha Mendrofa selaku anggota Masyarakat:

“ Saya tidak tahu bagi mana menjelaskannya tanyakan saja pada mereka yang terlibat dalam kegiatan itu” (Wawancara tanggal 14 April tahun 2017. Puku 18.00)

c. Kepatuhan dan Daya tanggap

. Menurut Bapak Edison Mendrofa selaku Kepala Desa Lalai I/II :

“Seluruh kegiatan Desa termasuk pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari Dana Desa, kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang menaunginya, dan segala kegiatan yang kita laksanakan merupakan sebagai bentuk respon dari aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Desa Lalai sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya” (Wawancara Tanggal 12 April 2017 Pukul 19.15)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Otahogo Mendrofa selaku Kepala Dusun II di Desa Lalai I/II :

“Sejauh ini yang kami lakukan sesuai dengan Instruksi dari Bapak kepala Desa untuk menampung segala aspirasi masyarakat selama proses pelaksanaan pembangunan di Desa ini, sebisa mungkin juga kita menggunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh Desa ini dalam proses pembangunan seturut dengan peraturan perundang undangan yang mengaturnya”(Wawancara tanggal 15 April. Pukul 21.30)

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh Bapak Aro sokhi Mendrofa selaku Masyarakat :

“sejauh pengamatan saya pengelolaan Dana Desa sangat di Dominasi oleh Kepala Desa, buktinya aktor-aktor yang terlibat hanya sebagian orang saja yang dapat dikatakan pro dengan Kepala Desa, Kemudian apabila Kepala Desa Responsif maka Dana Desa harusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan seperti Usaha Kecil menengah, atau kerajinan tangan yang dapat menjadi ekonomi kreatif, yang bahan bakunya terdapat di kebun Warga semisal rotan,bambu dan berbagai jenis kayu, sehingga membantu Ekonomi masyarakat kita yang umumnya petani karet, sebab seperti kkita ketahui bahwa harga karet sangat rendah ditambah lagi di Nias sendiri didominasi oleh musim hujan dimana masyarakat tidak bisa menderes atau menyadap karet.” (Wawancara tanggal 17 April 2017 pukul 11.30)

Bapak Faduhusi Mendrofa selaku Masyarakat menambahkan :

“Saya tidak tahu persis apakah pelaksanaan nya sesuai dengan aturan atau tidak, sebab saya tidak terlalu faham mengenai aturan Dana Desa Ini”(Wawancara tanggal 28 April. Pukul 22.45)

5. Hasil Kebijakan

a. Impak kepada Masyarakat, kelompok, dan Individu

Menurut Bapak Edison Mendrofa selaku Kepala Desa Lalai I/II mengatakan bahwa:

“Seperti yang telah saya sampaikan bahwa Dana Desa membawa dampak yang sangat besar bagi Desa Lalai I/II, misalkan saja pengaspalan jalan dari Dusun I menuju Dusun III sangat membantu aktifitas warga dalam melaksanakan kegiatannya seperti pergi keladang,menjual hasil bumi, bersekolah, beribada, dan kegiatan lainnya, dari segi Pemberdayaan pembentukan kelompok tani sangat membantu

Masyarakat untuk dilatih untuk menanam berbagai tanaman yang tidak diketahui sebelumnya seperti sayuran dan cabai, serta pembuatan pupuk dari bahan organik yang bahan dasarnya terdapat dikebun-kebun milik Masyarakat” (Wawancara tanggal 12 April 2017. Pukul 19.15)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Otahogo mendrofa selaku Kepala Dusun II :

“ Menurut saya Dampak Dana Desa ini sangat besar, pengaspalan jalan Desa mebuat setiap Dusun dapat dijangkau oleh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat” ”(Wawancara tanggal 15 April. Pukul 21.30)

Menurut Bapak Arofao Mendrofa selaku Masyarakat berpendapat bahwa :

“ Sepengetahuan saya pelaksanaan kegiatan Desa selama ini dilaksanakan melalui TPK yang orang-orangnya hanya yang pro dengan Kepala Desa saja, jadi merekalah yang menikmati dampak yang sangat besar.”(Wawancara Tanggal 28 April 2017. Pukul 21.00)

Pak Angandrowa Mendrofa selaku masyarakat Masyarakat mengatakan:

“Soal dampak dari dana Desa ini, selain adanya jalan yang telah diaspal selebihnya saya tidak tahu persis seperti apa, karna dari awal saya tidak terlibat” (Wawancara tanggal 20 April. Pukul 18.50)

b. Perubahan dan Penerimaan Masyarakat

Menurut Bapak Edison Mendrofa selaku Kepala Desa Lalai I/II :

“ Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dengan diberikannya kemandirian Kepada Desa oleh Pemerintah pusat dalam mengelola Dana Desa , berdampak sangat baik bagi Masyarakat di Desa Lalai I/II, sebab Dana tersebut dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan Desa kita saat ini, sehingga setelah di implementasikan membawa perubahan yang positif kepada masyarakat. Mengenai penerimaan Masyarakat sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dampak positif dari Program ini turut dinikmati oleh seluruh Masyarakat, apabila terdapat aspirasi masyarakat yang belum tercapai saat ini karena keterbatasan Dana, maka akan kita prioritaskan ditahun anggaran berikutnya” (Wawancara tanggal 12 April 2017. Pukul 19.15)

Hal ini juga di Dukung oleh pernyataan Bapak Arius Mendrofa, selaku Sekretaris Desa Lalai I/II yang mengatakan bahwa:

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa Dana Desa dapat dikatakan mengubah wajah Desa Lalai I/II, pengaspalan jalan dari Dusun I menuju Dusun III merupakan harapan Masyarakat yang dari berpulu-pulu tahun yang lalu, dan

akhirnya dengan hadirnya Dana Desa barulah keinginan tersebut terwujud” (Wawancara tanggal 13 April 2017. Pukul 18.00)

Hal berbeda diungkapkan oleh Bapak Arah Wajib Harefa selaku Masyarakat ;

“ Menurut saya adanya Pembangunan Jalan merupakan Anugerah yang harus disukuri, tetapi menurut saya dengan dana yang berkisar Rp 535.903.000 khusus pengaspalan jalan yang berukuran 3Meter x 480 Meter, sedikit berlebihan sebab realisasinya jalan tersebut hanya melalui Dusun I dan Dusun II, kemudian masyarakat yang dilibatkan dalam proses pembangunan, hanyalah orang-orang tertentu saja yang bisa dikatakan yang pro dengan Kepala Desa, Demikian dengan Pemberdayaan Masyarakat yang menghabiskan biaya Rp 35.000.000 untuk pembinaan kelompok tani yang sampai saat ini tidak ada manfaatnya, sebab anda tau sendiri masyarakat kita umumnya petani karet, apa bila musim hujan maka tidak bisa bekerja, seharusnya disinilah Pemerintah Desa terlibat dengan memberikan pelatihan pada masyarakat agar memiliki pekerjaan alternatif, misalnya Kerajinan tangan yang bahan bakunya tersedia dikebun-kebun warga, apalagi pemerintah pusat sedang mengkampanyekan ekonomi kreatif”(Wawancara tanggal 19 April 2017.Pukul 19.00)

Pernyataan berbeda dengan masyarakat lainnya, Bapak Yafao Mendrofa yang mengatakan bahwa :

“Meski bagaimanapun hadirnya Dana Desa turut membantu masyarakat dengan adanya pengaspalan jalan, walaupun biayanya saya rasa tidak sebanding dengan hasilnya, semoga ini menjadi koreksi untuk pelaksanaan Dana Desa ditahun anggaran selanjutnya, terlebih lebih pemberdayaan Masyarakat hendaknya dicari program yang benar-benar bermanfaat bagi perekonomian Masyarakat.” (Wawancara tanggal 13 April 2017 Pukul 08.30)